

Konsep pencegahan *bibliocrime* melalui pendekatan *crime prevention through environmental design* di Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia

Muhammad Inayat^{1*}; Labibah Zain^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*Korespondensi: 23200012018@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Bibliocrime is a form of crime that occurs in the library environment, such as theft, destruction, or misuse of library collections and facilities. This research aims to explore and formulate bibliocrime prevention strategies through the Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) approach at AKPRIND University Library Indonesia. The CPTED approach offers solutions based on the design of the physical and spatial environment that can increase security and reduce opportunities for crime. This research uses qualitative methods with field observations, interviews conducted with librarians, and documentation studies. The results showed that the application of CPTED principles such as natural surveillance, access control, territorial reinforcement, and facility maintenance can significantly minimize the potential for bibliocrime in the library environment.

Keywords: *bibliocrime; collection security; crime prevention through environmental design; college library*

ABSTRAK

Bibliocrime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungan perpustakaan, seperti pencurian, perusakan, atau penyalahgunaan koleksi dan fasilitas perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi pencegahan bibliocrime melalui pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia. Pendekatan CPTED menawarkan solusi berbasis desain lingkungan fisik dan tata ruang yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi lapangan, wawancara dilakukan dengan pustakawan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip CPTED seperti surveilans alami, pengendalian akses, penguatan teritorial, dan pemeliharaan fasilitas dapat secara signifikan meminimalkan potensi bibliocrime di lingkungan perpustakaan.

Kata Kunci: *bibliocrime; keamanan koleksi; crime prevention through environmental design; perpustakaan perguruan tinggi*

PENDAHULUAN

Perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan rentan terhadap tindakan *bibliocrime*, yaitu kejahatan yang menargetkan koleksi perpustakaan seperti pencurian, vandalisme, dan kerusakan material. Di Indonesia, kasus *bibliocrime* seringkali kurang terdata dengan baik, namun laporan dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa insiden seperti hilangnya buku, coretan pada koleksi, dan pemalsuan dokumen masih terjadi (Rahmasari, 2022). Universitas AKPRIND Indonesia, sebagai institusi pendidikan berbasis teknologi, memiliki perpustakaan dengan koleksi berharga yang perlu dilindungi dari ancaman tersebut (Perpustakaan AKPRIND University, n.d.). Fenomena ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mengganggu aksesibilitas pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti.

Perlindungan aset perpustakaan menjadi semakin penting di era digital, di mana literatur fisik tetap menjadi sumber primer yang tidak tergantikan (Nuansa & Rohmiyati, 2019). Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk meminimalisir risiko *bibliocrime*, salah satunya melalui modifikasi lingkungan fisik perpustakaan. Pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) menawarkan solusi berbasis desain untuk mengurangi peluang kejahatan dengan memanipulasi faktor lingkungan (Crowe, 1991).

Studi sebelumnya mengenai *bibliocrime* lebih banyak berfokus pada aspek pencegahan *bibliocrime* yang terjadi di perpustakaan perguruan tinggi dan dampak dari penerapan upaya pencegahan *bibliocrime* terhadap pelestarian koleksi yang ada di perpustakaan (Nurrahmi et al., 2023). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan berbasis lingkungan (*environmental criminology*) seperti *crime prevention through environmental design* dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan secara proaktif (Fandhy Wahyono, Dewi Septianti, Purwanita Setjanti, 2020). *Crime prevention through environmental design* menekankan prinsip *natural surveillance*, *access control*, dan *territorial reinforcement* untuk menciptakan ruang yang lebih aman (Gomez-Torres, 2025). Sangat sedikit penelitian yang mengaplikasikan pendekatan *crime prevention through environmental design* di perpustakaan. Implementasi *crime prevention through environmental design* di Indonesia masih sangat terbatas, khususnya di perpustakaan perguruan tinggi.

Penelitian ini berupaya mengukur dampak potensial dari rekomendasi yang diberikan melalui simulasi serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keamanan perpustakaan (*library security*) sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pengelola perpustakaan di Indonesia dalam merancang lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Studi oleh Maidabino dan Zainab dengan mengembangkan instrumen untuk menilai implementasi manajemen keamanan koleksi di perpustakaan universitas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tata kelola keamanan koleksi, operasi dan proses, isu sumber daya manusia, serta aspek fisik dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan koleksi merupakan aspek penting dalam pengelolaan perpustakaan, terutama di negara berkembang (Maidabino & Zainab, 2013). Di Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia, tercatat 50 insiden kerusakan buku dan 10 kasus pencurian dalam setahun. Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengatasi kerugian material dan intelektual yang terus berulang. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur mengenai *crime prevention through environmental design* di perpustakaan Indonesia tetapi juga menawarkan model pencegahan kejahatan yang *sustainable* dan *cost-effective*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menguji bagaimana *crime prevention through environmental design* dapat diaplikasikan di Universitas AKPRIND Indonesia dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan *crime prevention through environmental design* dapat menjadi solusi inovatif untuk mencegah *bibliocrime* di perpustakaan Universitas Akprind dengan memodifikasi elemen desain lingkungan (Armitage, 2016). Masalah utama yang diangkat adalah belum banyak kajian mendalam mengenai efektivitas *crime prevention through environmental design* dalam konteks perpustakaan di Indonesia, khususnya di institusi teknologi seperti Akprind. Data awal dari survei internal penulis di perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia menunjukkan bahwa 15% koleksi mengalami kerusakan dalam lima tahun terakhir, dengan 60% kasus disebabkan oleh aksi vandalisme dan pencurian oleh pengguna. Selain itu, sistem keamanan yang ada masih mengandalkan personel dan teknologi pasif, tanpa integrasi desain ruang yang mendukung pencegahan kejahatan.

Dengan pendekatan interdisipliner gabungan ilmu kriminologi, arsitektur, dan manajemen perpustakaan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi institusi pendidikan lain dalam mengamankan aset pengetahuan mereka. Hasilnya dapat menjadi dasar kebijakan baru dalam desain dan manajemen perpustakaan di era yang semakin kompleks.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, mengungkap, mendeskripsikan, serta menerangkan karakteristik atau fenomena sosial tertentu yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diuraikan dengan pendekatan kuantitatif (Leksono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan analisis dokumen. Informan ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah pustakawan yang bertugas mengelola koleksi yang ada di perpustakaan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menyajikannya. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teori Miles dan Huberman. Sugiyono menjelaskan bahwa proses pengolahan data kualitatif meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menciptakan lingkungan perpustakaan yang aman dan kondusif bagi kegiatan akademik, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai potensi risiko yang dapat mengarah pada tindakan kriminal, khususnya *bibliocrime*. Istilah *bibliocrime* merujuk pada segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan perpustakaan, baik terhadap koleksi, fasilitas, maupun terhadap sistem dan informasi yang dikelola perpustakaan (Santoso, 2011).

Di lingkungan Perpustakaan Universitas AKPRIND, terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada potensi *bibliocrime* yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu potensi utama adalah kurangnya kamera pengawas (CCTV) di area koleksi. Keberadaan CCTV telah terbukti menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), khususnya dalam aspek *natural surveillance* dan *mechanical surveillance* (Cozens et al., 2005).

Penerapan konsep *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) di Perpustakaan Universitas Akprind Indonesia dilakukan melalui beberapa prinsip utama, yaitu *natural surveillance*, *territorial reinforcement*, *natural access control*, dan *maintenance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan telah mengimplementasikan beberapa aspek *crime prevention through environmental design*, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Pengawasan Alami (*Natural Surveillance*)

Pengawasan alami (*natural surveillance*) merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan fisik yang memungkinkan aktivitas manusia berlangsung secara terbuka dan mudah diawasi (Thani et al., 2016). Pengawasan alami dapat disebut sebagai sebuah kemampuan dalam mengamati ruang publik di sebuah lingkungan sehingga setiap individu yang menempatinya merasa berada di bawah keadaan pengawasan (Tradisional et al., 2023). Pengawasan alami dirancang untuk meningkatkan visibilitas area tertentu agar aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal dapat dengan mudah terdeteksi, baik oleh petugas keamanan maupun oleh pengguna biasa di lingkungan tersebut (Hapsaria & Susantib, 2019).

Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa pelaku kejahatan akan merasa enggan melakukan tindakan kriminal di tempat yang secara visual terbuka dan diawasi, karena risiko tertangkap atau dilaporkan menjadi lebih tinggi. Dalam konteks desain lingkungan, pengawasan alami dapat diterapkan melalui beberapa strategi seperti tata letak ruang yang terbuka, penggunaan jendela besar untuk memaksimalkan pandangan keluar-masuk, pencahayaan yang memadai di seluruh area, dan penempatan aktivitas manusia di titik-titik strategis untuk menciptakan kehadiran sosial yang konstan. Misalnya, area-area seperti lorong, sudut ruangan, dan tempat penyimpanan harus didesain agar tidak menciptakan ruang tersembunyi atau sudut buta yang rawan terhadap penyalahgunaan. Selain itu, penggunaan furnitur dan rak dengan tinggi sedang memungkinkan staf perpustakaan untuk tetap dapat mengawasi pengguna tanpa mengganggu privasi mereka dalam membaca atau belajar.

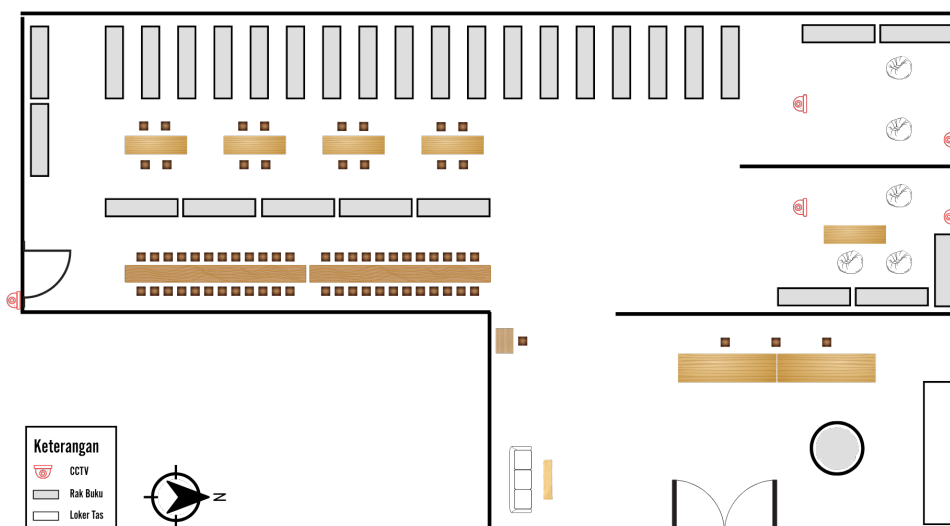
Penerapan pengawasan alami di perpustakaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus mencegah terjadinya *bibliocrime*, yaitu tindakan kriminal terhadap koleksi pustaka, seperti pencurian, perusakan, atau vandalisme. Di perpustakaan, strategi ini dapat diwujudkan dengan menata rak buku secara sejajar dan tidak terlalu tinggi agar memudahkan pandangan dari berbagai arah, menempatkan meja pustakawan menghadap ke area utama koleksi, serta menyediakan pencahayaan yang terang dan merata di seluruh ruangan. Selain itu, meja baca dan ruang diskusi sebaiknya ditempatkan di area yang terbuka dan terlihat dari jalur sirkulasi utama.

Konsep Pencegahan *Bibliocrime* melalui Pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* di Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia

Kamera pengawas (CCTV) juga dapat digunakan sebagai pelengkap, walaupun tidak termasuk dalam kategori pengawasan alami, namun kehadirannya mendukung terciptanya rasa diawasi di ruang publik.

Sebagai contoh, Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia dapat menerapkan pengawasan alami dengan mengatur tata letak ruang yang memungkinkan pustakawan memiliki garis pandang langsung ke seluruh rak buku dan area baca. Rak koleksi disusun tidak lebih dari 1,5 meter dan diletakkan secara paralel agar tidak menghalangi pandangan.

Pencahayaan alami melalui jendela besar maupun pencahayaan buatan dipastikan cukup untuk menjangkau semua sudut ruang, termasuk area yang jarang dikunjungi. Dengan demikian, pengawasan alami tidak hanya berfungsi sebagai strategi pencegahan kejahatan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi seluruh pengguna perpustakaan. Pengawasan alami di perpustakaan difasilitasi melalui tata letak ruangan yang terbuka, penempatan meja bantuan (*help desk*) di area strategis, serta penggunaan pencahayaan yang memadai.



Gambar 1. Layout Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia
Sumber: Penulis, 2025

Hasil observasi menunjukkan bahwa area sirkulasi buku dan ruang baca memiliki visibilitas yang baik, sehingga mengurangi potensi tindakan *bibliocrime* seperti pencurian atau vandalisme. Namun, beberapa sudut ruangan yang kurang terpantau, seperti rak-rak di bagian belakang, masih memerlukan penambahan cermin pantau atau kamera CCTV untuk meningkatkan pengawasan.

Pihak perpustakaan secara aktif mengimplementasikan prinsip pengawasan alami (*Natural Surveillance*) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak *bibliocrime*. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025, pustakawan menjelaskan bahwa pencahayaan menjadi aspek yang sangat diperhatikan, baik dalam bentuk pencahayaan alami melalui desain arsitektural maupun pencahayaan buatan.

Hal ini dilakukan agar seluruh area baca dan rak-rak koleksi dapat terlihat dengan jelas dari berbagai sudut pandang, sehingga meminimalisasi area tersembunyi yang rawan terjadi pelanggaran.

Selain itu, tata letak ruang juga dirancang dengan cermat. Meja kerja pustakawan ditempatkan di posisi strategis yang memungkinkan staf perpustakaan dapat mengamati langsung pergerakan pengunjung, khususnya di area koleksi terbuka yang bersifat *self-service*. Pengawasan visual ini dilengkapi pula dengan pemasangan kamera CCTV di sejumlah titik penting.

Kamera ini berfungsi sebagai alat bantu pengawasan yang mampu merekam aktivitas pengguna secara real-time maupun sebagai dokumentasi untuk penelusuran apabila terjadi insiden kehilangan atau pelanggaran lainnya. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya mengandalkan satu jenis pengawasan, tetapi mengombinasikan pendekatan visual langsung dan teknologi sebagai bentuk mitigasi risiko, sejalan dengan prinsip-prinsip *crime prevention through environmental design* (CPTED).

Berdasarkan layout perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia diatas dapat dilihat terdapat 4 CCTV yang berada didalam perpustakaan dan mengerah ke rak buku serta 1 CCTV yang berada diluar tepatnya di pintu darurat perpustakaan. Kurangnya kehadiran kamera pengawas di area koleksi memperbesar peluang terjadinya tindakan pencurian, perusakan, atau penyembunyian koleksi tanpa dapat dideteksi secara langsung. Di banyak studi perpustakaan, CCTV menjadi alat deteksi dini sekaligus bukti visual yang sangat membantu dalam investigasi jika terjadi kehilangan atau vandalisme terhadap koleksi (Senyah & Lamptey, 2011).



Gambar 2. CCTV Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia
Sumber: Penulis, 2025

Selain itu, desain tata ruang perpustakaan yang memiliki *blind spot* atau area yang tidak terjangkau oleh pandangan petugas maupun kamera pengawas juga menjadi kerentanan tersendiri. Area *blind spot* ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan kriminal secara tersembunyi.

Dalam konteks CPTED, tata letak ruang yang tidak memperhatikan visibilitas dan garis pandang yang jelas berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan karena mengurangi rasa waspada dan pengawasan alami dari pengguna lainnya (Newman, 1973).

Ruang-ruang sempit di antara rak buku yang panjang, sudut-sudut yang tidak terlihat dari meja staf, serta area pojok perpustakaan sering menjadi lokasi ideal untuk aktivitas ilegal seperti menyembunyikan buku atau vandalisme ringan.

Lebih jauh, tidak adanya pembatas akses yang jelas antara zona staf dan zona pengguna umum menjadi persoalan lain yang signifikan. Dalam praktik pengelolaan keamanan perpustakaan yang ideal, zona akses seharusnya dibedakan dengan tegas melalui pengaturan fisik seperti pintu terkunci, kartu akses, atau pengawasan langsung oleh petugas. Tanpa pembatasan ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses area yang seharusnya hanya dapat dimasuki oleh pustakawan atau petugas, membuka peluang terjadinya pencurian dokumen penting, manipulasi data sistem, atau bahkan sabotase. Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia membagi ruangan perpustakaan antara ruang perpustakaan umum dengan ruangan pengolahan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengawasan kepada pemustaka. Ruang pengolahan dikhususkan untuk menyimpan bahan koleksi yang belum diolah, ruangan ini juga diperuntukkan kepada staff perpustakaan dan ruang kepala perpustakaan serta tamu yang punya kepentingan dengan kepala perpustakaan. Ruang koleksi umum berada di ruangan yang berbeda dengan ruangan pengolahan. Pada ruang koleksi umum terdapat 2 orang pustakawan yang berada di lobi perpustakaan yang bertugas melayani pemustaka yang datang. Posisi pustakawan dapat melihat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pemustaka, walaupun ada sudut yang tidak terlihat dengan jelas oleh pustakawan. Hal tersebut membuka peluang terjadinya pencurian atau perusakan koleksi perpustakaan.

Kehilangan koleksi tanpa data sirkulasi bisa disebabkan oleh pencurian langsung (*bypassing circulation system*), pencatatan manual yang tidak akurat, atau bahkan kerja sama antara oknum pengguna dan staf. Hal ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mengganggu kelancaran proses akademik dan pembelajaran yang bergantung pada ketersediaan referensi. Kehilangan buku tanpa jejak peminjaman merupakan salah satu bentuk *bibliocrime* yang paling sering ditemukan di perpustakaan perguruan tinggi di negara berkembang, disebabkan oleh lemahnya kontrol inventaris dan minimnya tindakan pencegahan. Upaya yang dilakukan oleh perpustakaan ialah dengan menyediakan loker untuk menyimpan tas, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus pencurian buku. Upaya lain yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia untuk meminimalisir terjadinya *bibliocrime* ialah dengan membuat postingan mengenai *bibliocrime* dan mempostingnya di media sosial Instagram milik perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat menambah pekaan pemustaka yang datang ke perpustakaan agar tidak melakukan tindakan *bibliocrime*.



Gambar 3. Postingan Edukasi *Bibliocrime*
 Sumber: Instagram.com/library_akprind

Selain itu, perpustakaan juga rutin menyisipkan pesan-pesan edukatif mengenai etika penggunaan koleksi perpustakaan dalam setiap unggahan kontennya, baik berupa infografis, video pendek, maupun cerita interaktif di fitur Instagram *Stories*. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif di kalangan pemustaka mengenai pentingnya menjaga dan merawat fasilitas perpustakaan sebagai tanggung jawab bersama. Lebih jauh, pihak perpustakaan juga berupaya menjalin komunikasi dua arah melalui media sosial tersebut dengan membuka ruang diskusi atau sesi tanya jawab terkait bibliocrime dan sanksi yang dapat dikenakan. Dengan cara ini, diharapkan muncul budaya literasi informasi yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial di lingkungan kampus. Langkah preventif melalui media sosial ini merupakan bagian dari pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) yang diterapkan oleh perpustakaan, khususnya dalam aspek *community engagement* dan *social management*. Melalui pendekatan ini, lingkungan sosial yang kondusif dapat dibentuk untuk menekan potensi terjadinya tindakan kriminal, termasuk *bibliocrime*.

Kontrol Akses Alami (*Natural Access Control*)

Kontrol akses alami (*natural access control*) adalah salah satu prinsip utama dalam pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) yang bertujuan untuk mengarahkan pergerakan orang melalui desain fisik lingkungan (Zainol et al., 2022).

Konsep Pencegahan *Bibliocrime* melalui Pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* di Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia

Konsep ini mengandalkan tata letak ruang dan struktur fisik untuk secara alami memandu siapa saja ke arah yang diinginkan dan menjauh dari area yang dibatasi atau rawan risiko (Ramadhan, 2018). Dengan meminimalkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyusup atau bersembunyi, kontrol akses alami menciptakan rasa aman dan memperkuat fungsi pengawasan baik secara formal maupun informal. Dalam konteks kontrol akses alami, elemen-elemen seperti jalur masuk dan keluar yang jelas, penempatan pintu dan jendela yang strategis, pembatas visual atau fisik seperti pagar rendah, tanaman hias, serta pencahayaan yang memadai sangat penting. Tujuannya adalah untuk membatasi akses tanpa menciptakan suasana represif, sehingga lingkungan tetap ramah bagi pengguna yang sah. Dengan mengatur pola sirkulasi dan aksesibilitas secara logis dan terstruktur, pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan oleh pengguna dan petugas keamanan.



Gambar 4. Desain Interior Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia
Sumber: Libellus Media Alternatif

Di lingkungan perpustakaan, penerapan kontrol akses alami menjadi sangat relevan, mengingat perpustakaan merupakan ruang publik yang terbuka namun tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap aset dan penggunaannya, seperti yang dilakukan oleh perpustakaan Akprind yang mana pintu masuk utama yang dirancang agar menghadap ke area resepsionis atau meja layanan informasi, sehingga staf perpustakaan dapat langsung memantau siapa yang masuk dan keluar. Area-area terbatas seperti ruang server, ruang arsip, atau ruang penyimpanan buku langka sengaja dirancang pada ruangan yang berbeda dengan satu jalur masuk yang jelas dan dilengkapi penghalang visual maupun fisik agar tidak diakses sembarangan. Selain itu, perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia juga memanfaatkan elemen-elemen desain seperti jalur sirkulasi yang logis, penempatan rak buku yang tidak menghalangi pandangan, serta pemisahan zona baca dan zona koleksi referensi sehingga dapat membantu menciptakan aliran pergerakan yang terkontrol.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025, pihak perpustakaan telah menerapkan sistem pengaturan sirkulasi pengguna yang cukup ketat demi menjaga keamanan area dan koleksi. Pengguna diarahkan untuk hanya masuk dan keluar melalui satu pintu utama yang diawasi

secara langsung oleh petugas. Selain itu, akses menuju ruang koleksi tertutup serta ruang kerja staf dibatasi dengan penguncian pintu yang hanya dapat dibuka dengan izin khusus.

Kebijakan ini diterapkan untuk memudahkan pengawasan terhadap siapa saja yang masuk ke area-area yang dianggap penting dan rawan terhadap potensi pelanggaran atau kehilangan, sehingga keamanan ruang dan koleksi dapat lebih terjamin.

Penerapan kontrol akses alami di perpustakaan tidak hanya berdampak pada peningkatan keamanan, tetapi juga menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Ketika pengguna merasa lingkungan tertata baik dan aman, maka akan tercipta atmosfer belajar yang kondusif dan produktif. Oleh karena itu, prinsip kontrol akses alami harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan perancangan ulang ruang-ruang perpustakaan modern, khususnya dalam upaya pencegahan tindakan kriminal seperti *bibliocrime*. Saat ini, perpustakaan telah menerapkan kontrol akses dasar seperti pencatatan pengunjung, penyediaan loker dan penjagaan di pintu masuk. Namun, sistem ini belum sepenuhnya efektif karena masih memungkinkan pengunjung melakukan pencurian buku, karena belum adanya sistem *radio frequency identification* (RFID) dan *electronic gate* untuk mendeteksi buku yang belum dipinjam secara resmi oleh pemustaka.

Penegasan Teritorial Alami (*Territorial Reinforcement*)

Penegasan teritorial alami atau *territorial reinforcement* merupakan prinsip lainnya dalam pendekatan *crime prevention through environmental design* (CPTED) (Askari & Soltani, 2023). Konsep ini menekankan pada pentingnya menciptakan batas-batas yang jelas antara ruang publik, semi-publik, dan privat melalui desain dan tata ruang. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap ruang, baik oleh individu maupun kelompok, sehingga muncul kecenderungan untuk menjaga dan mengawasi area tersebut dari perilaku menyimpang atau tindakan kriminal. Dengan kata lain, penegasan teritorial bertujuan memperkuat persepsi bahwa suatu area dimiliki dan diawasi oleh pihak tertentu. Ketika batas-batas tersebut jelas dan dikelola dengan baik, maka pelaku kejahatan akan merasa bahwa aktivitas mereka mudah dikenali dan berisiko diketahui oleh pengguna ruang tersebut. Secara psikologis, penegasan teritorial membangun pesan non-verbal bahwa suatu area "dimiliki", diawasi, dan dipertahankan, sehingga potensi tindakan kriminal dapat diminimalkan.

Hasil wawancara pada tanggal 2 Juni 2025 dengan narasumber S M mengungkapkan bahwa perpustakaan telah menerapkan pembagian zona yang jelas sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian ruang. Setiap zona dalam perpustakaan dibedakan secara visual melalui berbagai cara, seperti penggunaan desain ruangan yang berbeda, penataan furnitur yang spesifik, dan pemasangan papan petunjuk yang informatif. Pembedaan ini bertujuan untuk memisahkan area yang dapat diakses oleh umum dengan area yang bersifat terbatas. Sebagai contoh, ruang kerja staf perpustakaan diberi label khusus yang menunjukkan larangan bagi pengunjung untuk memasukinya. Penandaan ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk arah, tetapi juga menjadi simbol adanya pengawasan dan pembatasan yang tegas dalam lingkungan perpustakaan, sehingga menciptakan rasa tertib dan aman dalam penggunaan ruang.

Penegasan teritorial tidak hanya berwujud dalam pagar atau tembok fisik, tetapi juga bisa berbentuk desain lansekap, pencahayaan, warna lantai, penempatan furnitur, atau bahkan penggunaan simbol seperti papan nama atau marka lantai yang menunjukkan kepemilikan atau batas-batas ruang. Prinsip ini sangat bergantung pada visualisasi dan perancangan spasial yang memberikan sinyal sosial kepada pengguna ruang, termasuk pelaku kriminal. Perpustakaan telah membagi zonasi secara jelas, seperti area baca, area referensi, dan area administrasi. Penggunaan tanda (*signage*) dan perbedaan desain furnitur membantu pengunjung memahami batas wilayah tertentu. Dalam penelitian ditemukan bahwa pada perpustakaan Akprind sudah terdapat pembatasan akses ke ruang penyimpanan koleksi berharga (seperti skripsi dan buku langka) dapat yang dapat mengurangi risiko pencurian.



Gambar 5. Pintu Darurat
Sumber: Penulis, 2025

Gambar tersebut menunjukkan adanya satu pintu darurat yang berada di sisi selatan ruang perpustakaan umum yang berguna untuk jalur evakuasi cepat dan aman saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau bencana lain. Pintu ini juga berperan dalam mengurangi risiko cedera atau kematian karena memungkinkan orang untuk keluar dari gedung dengan cepat dan efisien. Pintu ini juga mengarah langsung ke pintu utama pada ruangan staf atau ruang pengolahan. Hal ini memudahkan pustakawan untuk berlalu Lalang dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Pada sisi luar pintu juga memuat himbauan “*Staf Only Selain Karyawan Dilarang Masuk*” yang mana ditujukan agar pengguna perpustakaan tidak menggunakan pintu tersebut kecuali pada masa genting saja.

Pemeliharaan dan Manajemen (*Maintenance*)

Pemeliharaan dan manajemen (*maintenance*) merupakan proses yang berkesinambungan dalam menjaga, memperbaiki, dan mengoptimalkan kondisi fisik, teknis, maupun fungsional dari fasilitas, peralatan, dan infrastruktur agar tetap berada dalam kondisi yang aman, layak pakai, dan mendukung fungsi utamanya (Lee et al., 2016).

Prinsip *maintenance* dalam *crime prevention through environmental design* berkaitan dengan kesan terawatnya lingkungan untuk mencegah kejahatan (Sakina, 2020).

Dalam konteks bangunan dan fasilitas publik seperti perpustakaan, pemeliharaan tidak hanya mencakup aspek kebersihan dan perbaikan teknis, melainkan juga melibatkan pengelolaan sumber daya, pengawasan sistem keamanan, serta penyusunan strategi preventif untuk menghindari kerusakan atau risiko yang lebih besar. Menurut Hensey (Chung, 2002) pemeliharaan merupakan bagian integral dari manajemen fasilitas yang bertujuan menciptakan lingkungan yang efisien, aman, dan mendukung keberlangsungan operasional jangka panjang. Dalam ruang lingkup perpustakaan, pemeliharaan memiliki dimensi yang luas, mulai dari perawatan fisik bangunan dan infrastruktur (seperti AC, pencahayaan, sistem kelistrikan, dan furnitur), hingga perawatan koleksi bahan pustaka seperti buku, majalah, dan dokumen digital. Pemeliharaan rutin (*routine maintenance*) seperti pembersihan ruang baca, pengecekan rak buku, dan inspeksi sarana fisik secara berkala harus dilakukan secara sistematis agar lingkungan perpustakaan tetap kondusif dan nyaman bagi pengguna. Selain itu, terdapat juga pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) yang mencakup tindakan proaktif untuk mencegah kerusakan, seperti pengendalian kelembaban untuk mencegah jamur pada buku, serta pengecekan sistem keamanan dan kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 dengan salah satu staf perpustakaan, terungkap bahwa pemeliharaan rutin merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perpustakaan. Staf tersebut menjelaskan bahwa kerusakan pada fasilitas seperti CCTV atau lampu yang padam dapat membuka peluang terjadinya kehilangan koleksi buku. Oleh karena itu, pihak perpustakaan secara konsisten melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. Rak-rak koleksi selalu ditata dengan rapi, pencahayaan dijaga agar tetap optimal, dan petugas kebersihan secara rutin memeriksa area-area seperti toilet maupun pojok-pojok yang jarang dilalui oleh pengunjung. Upaya tersebut tidak hanya untuk menjaga kenyamanan, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan tidak langsung. Mereka meyakini bahwa ketika perpustakaan tampil bersih, tertata, dan terawat, maka akan tumbuh kesan bahwa tempat tersebut diawasi dan dijaga, sehingga potensi terjadinya pelanggaran atau tindakan yang merugikan seperti bibliocrime dapat diminimalkan.

Manajemen pemeliharaan di perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia mencakup aspek administratif dan perencanaan strategis. Hal ini melibatkan penyusunan jadwal pemeliharaan, pengalokasian anggaran, pelatihan staf teknis, serta pelibatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dalam konteks pencegahan kejahatan di perpustakaan, pemeliharaan dan manajemen juga berperan penting sebagai bagian dari pendekatan *crime prevention through environmental design* (CPTED).

Menurut Crowe (Timothy D. Crowe, 2013), lingkungan fisik yang dirawat dengan baik dapat mengurangi persepsi akan kelemahan dan meningkatkan rasa aman. Penerapan prinsip ini di perpustakaan misalnya dengan memastikan pencahayaan yang cukup di setiap sudut ruangan, kamera CCTV yang berfungsi baik, rak yang tertata rapi, serta perbaikan segera pada elemen yang rusak. Kondisi perpustakaan yang terjaga secara fisik akan menurunkan peluang terjadinya tindakan kriminal seperti *bibliocrime* (pencurian atau perusakan koleksi), karena menciptakan suasana pengawasan alami dan keteraturan.

Dengan demikian, pemeliharaan dan manajemen bukanlah sekadar kegiatan teknis rutin, melainkan bagian integral dari tata kelola perpustakaan modern yang mendukung keberlanjutan fungsi layanan, kenyamanan pengguna, serta keamanan koleksi. Penerapannya secara konsisten dan sistematis akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan memperkuat upaya preventif terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia secara umum telah menjaga kebersihan dan kerapian ruangan, tetapi beberapa fasilitas seperti lampu yang rusak atau rak buku yang tidak tertata rapi dapat menciptakan kesan neglect (ketidakpedulian), yang berpotensi memicu tindakan vandalisme. Pemeliharaan rutin dan perbaikan cepat terhadap kerusakan kecil sangat diperlukan untuk mempertahankan lingkungan yang aman.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan empat strategi *crime prevention through environmental design* (CPTED) pada perpustakaan Akprind.

1. Pengawasan Alami (*Natural Surveillance*)

Desain ruangan yang terbuka sehingga memudahkan pustakawan memantau aktivitas yang dilakukan pemustaka serta pemasangan CCTV pada beberapa titik perpustakaan dan membuat desain poster terkait *bibliocrime* pada laman sosial media perpustakaan. Hal tersebut dilakukan agar ruangan perpustakaan dapat lebih visibilitas, sehingga diharapkan dapat menanggulangi tindakan *bibliocrime* pada area perpustakaan.

2. Kontrol Akses Alami (*Natural Access Control*)

Desain perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia mengedepankan pengawasan dan pembatasan akses dengan menempatkan pintu masuk utama menghadap langsung ke meja layanan informasi untuk mempermudah pemantauan, serta menempatkan area terbatas seperti ruang server dan arsip di lokasi khusus dengan jalur masuk tunggal dan dilengkapi penghalang visual maupun fisik guna mencegah akses tidak sah.

3. Penegasan Teritorial Alami (*Teritorial Reinforcement*)

Pembatasan akses ke ruang penyimpanan koleksi berharga (seperti skripsi dan buku langka) dapat yang dapat mengurangi risiko pencurian. Penyediaan pintu darurat di sisi selatan perpustakaan umum berfungsi sebagai jalur evakuasi cepat saat keadaan darurat serta memudahkan mobilitas staf antar ruang. Pintu ini dilengkapi dengan himbauan agar hanya digunakan oleh staf atau saat situasi darurat, guna menjaga keamanan dan ketertiban area perpustakaan.

4. Pemeliharaan dan Manajemen (*Maintenance*)

Pemeliharaan rutin terhadap fasilitas perpustakaan, seperti CCTV, pencahayaan, dan kebersihan, berperan penting dalam mencegah kehilangan buku. Lingkungan yang bersih, terang, dan tertata rapi menciptakan kesan tempat yang terjaga, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran.

Penerapan prinsip *crime prevention through environmental design* di perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah *bibliocrime*. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem keamanan fisik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab pengguna terhadap lingkungan perpustakaan. Diperlukan kolaborasi antara pihak pengelola, mahasiswa, dan unit keamanan untuk menerapkan prinsip *crime prevention through environmental design* secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlu dilakukan audit keamanan rutin, pelatihan staf tentang CPTED, dan pengembangan kebijakan perpustakaan berbasis desain preventif.

Beberapa kendala dalam penerapan CPTED di perpustakaan ini meliputi keterbatasan anggaran untuk pemasangan teknologi keamanan mutakhir dan kurangnya kesadaran pengunjung terhadap pentingnya keamanan koleksi. Oleh karena itu, disarankan untuk: Memperkuat pengawasan elektronik dengan menambah CCTV dan sensor *anti-theft*. Meningkatkan sosialisasi kepada pengguna perpustakaan tentang pentingnya mencegah *bibliocrime*. Melakukan evaluasi berkala terhadap tata letak dan sistem keamanan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Dengan penyempurnaan penerapan CPTED, perpustakaan Universitas AKPRIND Indonesia dapat menjadi contoh dalam pencegahan *bibliocrime* melalui pendekatan desain lingkungan yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, R. (2016). Crime prevention through environmental design. In *Environmental criminology and crime analysis* (pp. 278–304). Routledge.
- Askari, A. H., & Soltani, S. (2023). CPTED Principles and Preventing Crimes: The Cases from Shiraz City, Iran. *Journal of Design and Built Environment*, 23(2), 1–13.
- Chung, H. W. (2002). *Understanding quality assurance in construction: a practical guide to ISO 9000 for contractors*. Routledge.
- Cozens, P. M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography. *Property Management*, 23(5), 328–356.
- Crowe, T. D. (1991). *Crime Prevention Through Environmental Design Application of Architectural Design and Space Management Concept*. National Crime Prevention Institute.
- Fandhy Wahyono, Dewi Septianti, Purwanita Setjanti, B. S. (2020). Konsep Pencegahan Vandalisme melalui Pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (Studi Kasus: Jalan Niaga Samping). *Journal Thematic Urban Design, March*, 1–19.
- Gomez-Torres, A. (2025). Public Space and Safety: Access Control a Means for Territorial Reinforcement. In *The Dusk of Design: Exploring Multidisciplinary Approaches and Evolutionary Biology in Architecture* (pp. 133–146). Springer.
- Hapsaria, D. O., & Susantib, R. (2019). Penilaian Kualitas Desain Perguruan Tinggi dengan Menggunakan Pendekatan CPTED di Kota Semarang. *Ruang*, 5(1), 20–31.
- Lee, J. S., Park, S., & Jung, S. (2016). Effect of crime prevention through environmental design (CPTED) measures on active living and fear of crime. *Sustainability*, 8(9), 872.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maidabino, A. A., & Zainab, A. N. (2013). Collection security management at university libraries: assessment of its implementation status. *ArXiv Preprint ArXiv:1301.5385*.
- Newman, O. (1973). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Collier Books New York.
- Nuansa, G., & Rohmiyati, Y. (2019). Evaluasi sistem keamanan perpustakaan bagi perlindungan koleksi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 501–510.
- Nurrahmi, N., Munandar, R. A., & Asnawi, A. (2023). Pencegahan Bibliocrime sebagai Upaya Preventif Pelestarian Koleksi (Evaluasi pada Perpustakaan Universitas Ubudiyah Indonesia). *Jurnal Adabiya*, 25(1), 90. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v25i1.16789>
- Perpustakaan AKPRIND University. (n.d.). *Info Perpustakaan*. <https://lib.akprind.ac.id/index.php?p=libinfo&menu=profile>
- Rahmasari, F. W. (2022). *Bibliocrime di Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ramadhan, G. A. (2018). The Development of Concept of Territory in International Relations. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(2), 120–135.
- Sakina, B. (2020). A study on crime prevention through environmental design concept application in a private house in Yogyakarta, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 426(1), 12093.
- Santoso, H. (2011). Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan perpustakaan Perguruan Tinggi. *Universitas Negeri Malang*.
- Senyah, Y., & Lamptey, R. B. (2011). Personal security and safety in academic libraries: A case study of the Kwame Nkrumah University of science and technology library, Kumasi, Ghana. *Library & Archival Security*, 24(2), 83–102.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Thani, S. K. S. O., Hashim, N. H. M., & Ismail, W. H. W. (2016). Surveillance by design: Assessment

using principles of crime prevention through environmental design (CPTED) in urban parks. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 234, 506–514.

Timothy D. Crowe, L. J. F. (2013). *Crime prevention through environmental design*. Elsevier.

Tradisional, P., Di, S., & Baliem, L. (2023). *Penerapan konsep keamanan & kenyamanan dalam permukiman tradisional silimo di lembah baliem*. 5(2), 27–41.

Zainol, H., Sakip, S. R. M., Sazali, M. F., Latif, H. M., & Bahari, N. A. M. (2022). The contributory elements in natural access control of crime prevention in residential housing. *Malaysian Journal of Sustainable Environment*, 9(1), 303–326.